

PERBANDINGAN PENERAPAN TINDAKAN PENYADAPAN OLEH PENEGAK HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia terutama hak atas privasi. Walaupun melanggar hak asasi manusia, penyadapan masih dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana untuk mencari bukti-bukti dari suatu perkara pidana. Namun, pengaturan yang ada terdapat beberapa perbedaan penerapan tindakan penyadapan antara KPK dengan Kepolisian ataupun Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan penerapan penyadapan yang ada di Indonesia dan mendalami apakah pengaturan penyadapan harus disatukan dalam satu undang-undang. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana penulis menggunakan studi kepustakaan dan wawancara sebagai sumber data. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menerangkan bahwa, 1) di Indonesia, pengaturan mengenai penyadapan banyak tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, pengaturan yang ada saat ini masih belum mengatur mengenai penerapan penyadapan secara komprehensif sehingga pengaturan yang ada masih dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. 2) Penerapan penyadapan yang ada pun memiliki ketidakseimbangan antara lembaga penegak hukum sehingga menimbulkan beberapa problematika. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengaturan mengenai penyadapan harus dilakukan pembaharuan agar dapat memberikan kepastian hukum. Ada dua hal yang dapat dilakukan terkait pembaharuan mengenai penerapan penyadapan oleh penegak hukum, yaitu pembaharuan KUHAP dan perancangan undang-undang mengenai penyadapan.

Kata Kunci : Penerapan Penyadapan, Penegak Hukum, Kepastian Hukum

COMPARISON OF THE APPLICATION OF WIRETAPPING BY LAW ENFORCEMENT IN INVESTIGATIONS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS

ABSTRACT

Wiretapping is an act that violates human rights, especially the right to privacy. Even though it violates human rights, wiretapping can still be carried out by law enforcement officials in the criminal justice process to seek evidence from a criminal case. However, the existing regulations have several differences in the application of wiretapping between the Corruption Eradication Commission and the Police or the Attorney General's Office. Based on this, the authors conducted a study aimed at comparing the implementation of wiretapping in Indonesia and exploring whether wiretapping arrangements should be integrated into one law. The author uses a normative juridical research method where the writer uses literature studies and interviews as data sources. The results of research conducted by the author explain that in Indonesia, regulations regarding wiretapping are widely scattered in various laws and regulations. However, the current regulations do not yet regulate the application of wiretapping in a comprehensive manner, so that existing regulations can still be abused by law enforcement officials. The existing application of wiretapping also has an imbalance between law enforcement agencies, causing several problems. Therefore, the author is of the opinion that the regulation regarding wiretapping must be renewed so that it can provide legal certainty. There are two things that can be done regarding the reform regarding the application of wiretapping by law enforcement, namely the reform of the Criminal Procedure Code and the drafting of a law regarding wiretapping.

Keywords : *Wiretapping Application, Law Enforcement, Legal Certainty*